




Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENSTRA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	2 b. Meningkatnya Pelayanan Publik		
	2 b.1. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan		
	2 b.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,90
	2	Persentase Layanan yang sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase urusan Perangkat Daerah yang terlaksana dengan baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa baik	7
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
<p>Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Timur</p>  <p>Ketut Sri Karjawati, S.KM., M.Kes Pembina Tk. I NIP. 19710626 199402 2 001</p>			

Form 2.b
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENSTRA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	2 b. Meningkatnya Pelayanan Publik		
	2 b.1. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan		
	2 b.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,90
	2	Persentase Layanan yang sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase urusan Perangkat Daerah yang terlaksana dengan baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa baik	7
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
<p>Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Timur</p>  <p><u>Keut Sri Karjawati, S.KM., M.Kes</u> Pembina Tk. I NIP. 19710626 199402 2 001</p>			


Form 2.c
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data		RENJA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program		2 c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2c.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2c.2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2c.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2c.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2c.5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
	2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	3	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	4	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	5	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	6	persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%
	7	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7
	Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10. Penyelarasan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 3. persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 4. persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 5. persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 6. persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 7. terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		
	Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Timur  Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes Pembina Tk. I		

Form 2b.1
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENSTRA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	2 b. Meningkatnya Pelayanan Publik		
	2 b.1.Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan		
	2 b.2.Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,90
	2	Persentase Layanan yang sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase urusan Perangkat Daerah yang terlaksana dengan baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa baik	7
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
<p>Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Timur</p>  <p><u>Ketur Sri Karjawati, S.KM., M.Kes</u> Pembina Tk. I NIP. 19710626 199402 2 001</p>			

Form 2b.2
Format Penetapan Konteks Risiko Strategis OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENSTRA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2025-2029		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Sasaran Strategis	2 b. Meningkatnya Pelayanan Publik		
	2 b.1. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan		
	2 b.2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa		
IKU Renstra OPD	No	IKU	Target
	1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	93,90
	2	Persentase Layanan yang sesuai dengan Kewenangan dan Standar Pelayanan	100%
	3	Persentase urusan Perangkat Daerah yang terlaksana dengan baik di Tingkat Kecamatan	100%
	4	Jumlah Desa yang Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa baik	7
Program	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
	3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
<p>Denpasar, 31 Desember 2025 Camat Denpasar Timur</p>  <p><u>Ketur Sri Karjawati, S.KM., M.Kes</u> Pembina Tk. I NIP. 19710626 199402 2 001</p>			

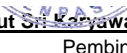
Form 2c.1
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar		
Penilaian Tahun	: 2026		
Periode yang Dinilai	: RPJMD Tahun 2025 - 2029		
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan		
OPD yang Dinilai	: Kecamatan Denpasar Timur		
Sumber Data	RENJA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program	2 c.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2c.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2c.2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2c.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2c.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2c.5.. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
	2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	3	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	4	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	5	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	6	persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%
	7	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7
Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10. Penyelarasan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 3. persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 5. persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 6. persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 7. terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		

Denpasar, 31 Desember 2025

Camat Denpasar Timur




Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710626 199402 2 001

Form 2c.2
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENJA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program	<p>2 c.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2c.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>2c.2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>2c.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>2c.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>2c.5.. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
	2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	3	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	4	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	5	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	6	persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%
	7	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7
<p>Program :</p> <p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</p> <p>3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p> <p>6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</p>			
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Kegiatan:</p> <p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <p>2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</p> <p>3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</p> <p>9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>10. Penyelarasan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>		
	<p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <p>1. persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan</p> <p>2. persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</p> <p>3. persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>4. persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</p> <p>5. persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</p> <p>6. persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum</p> <p>7. terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa</p>		

Camat Denpasar Timur



Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 2c.3
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENJA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program	2 c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2c.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2c.2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2c.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2c.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2c.5.. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
	2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	3	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	4	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	5	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	6	persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%
	7	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7
Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10. Penyelarasan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 3. persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 5. persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 6. persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 7. terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa			



Ketut Sri Karjowati, S.KM., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 2c.4
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data		RENJA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026	
Tujuan Strategis		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	
Program		2 c.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2c.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2c.2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2c.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2c.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2c.5.. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
	2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	3	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	4	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	5	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	6	persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%
	7	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7
	Program : 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10. Penyelarasan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa <p>Keluaran/Hasil Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 3. persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 5. persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 6. persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 7. terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 		



Ketut Sri Karjowati, S.KM., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 2c.5
Format Penetapan Konteks Risiko Operasional OPD Kecamatan Denpasar Timur

Nama Pemda	:	Pemerintah Daerah Kota Denpasar	
Penilaian Tahun	:	2026	
Periode yang Dinilai	:	RPJMD Tahun 2025 - 2029	
Urusan Pemerintahan	:	Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	:	Kecamatan Denpasar Timur	
Sumber Data	RENJA Kecamatan Denpasar Timur Tahun 2026		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		
Program	2 c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2c.1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2c.2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2c.3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 2c.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 2c.5.. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
	1	Persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%
	2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%
	3	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%
	4	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
	5	persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%
	6	persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%
	7	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	7
Program :			
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Program, Kegiatan dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan: 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 9. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10. Penyelarasan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 11. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Keluaran/Hasil Kegiatan: 1. persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan 2. persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat 3. persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 4. persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 5. persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 6. persentase penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 7. terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa		

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Timur



Ketut Sri Karyawati, S.KM., M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 3.b
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Pemerintah Daerah Kota Denpasar Nama OPD : Kecamatan Denpasar Timur Tahun Penilaian : 2026 Periode yang dinilai : RPJMD Tahun 2025 - 2029 Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Pemerintahan : Unsur Kewilayahan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis Pemerintah : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan									
2	Sasaran : 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa									
3	Program : 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	kinerja perangkat daerah tidak optimal	RSO.26.41.34.01	Kepala OPD	Anggaran dan Sumber Daya Aparatur terbatas	Internal	C	terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan utama	Kepala OPD
			penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak	RF.26.41.34.01	PA, Bendahara Pengeluaran dan PPTK	Pihak terkait tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang setiap jenis tunjangan	Internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	ASN yang bersangkutan, bendahara gaji
			pengadaan barang/jasa diarahkan ke rekanan tertentu	RF.26.41.34.02	Camat	1. lemahnya pengawasan 2. adanya pengaruh/loby/tekanan dari penyedia/atasan	Internal dan Eksternal	C	timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan, kelurahan
	2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) di Kecamatan Denpasar Timur	kualitas pelayanan rendah	RSO.26.41.34.02	Kepala OPD dan Pelayanan	prosedur tidak efektif dan keterbatasan teknologi	Internal dan Eksternal	C	menurunnya tingkat kepuasan publik	Kepala OPD dan Pelayanan
			grafifikasi dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan publik	RF.26.41.34.13	Camat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kecamatan dan Kelurahan

			Pemalsuan dokumen pelayanan (izin, rekomendasi, surat keterangan)	RF.26.41.34.14	Camat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Kecamatan dan Kelurahan
	3. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	gangguan ketentraman dan ketertiban umum	RSO.26.41.34.03	Camat/Satpol PP	lemahnya koordinasi	Internal dan Eksternal	UC	terganggunya keamanan dan ketertiban	Camat/Satpol PP
			Penyalahgunaan wewenang aparat dalam operasi ketertiban	RF.26.41.34.19	Camat, Kasi Trantib	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
			Manipulasi laporan kegiatan pengamanan dan patroli	RF.26.41.34.20	Camat, Kasi Trantib	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan

4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	persentase kewenangan pemerintah yang dilaksanakan di kecamatan	kebijakan tidak efektif	RSO.26.41.34.04	OPD Terkait	sinkronisasi regulasi lemah	Internal	C	tidak tercapainya tujuan serta kebijakan	OPD Terkait
		Kegiatan rapat, sosialisasi atau forum yang tidak dilaksanakan (fiktif)	RF.26.41.34.23	Camat, Kasi Pemerintahan	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
		Mark-up biaya konsumsi, sewa tempat dan honorarium	RF.26.41.34.24	Camat, Kasi Pemerintahan	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
5. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dapat pembinaan dan pengawasan	tata kelola desa tidak akuntabel	RSO.26.41.34.05	Dinas PMD/Inspektorat	kapasitas aparatur desa rendah	Eksternal	UC	terjadinya penyimpangan keuangan desa	Dinas PMD/Inspektorat
		gratifikasi dalam kegiatan perencanaan	RF.26.41.34.27	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
		Penyalahgunaan anggaran pembinaan dan pelatihan aparatur desa	RF.26.41.34.28	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase tingkat partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan daerah	program tidak berkelanjutan	RSO.26.41.34.06	Dinas PMD/Kecamatan	partisipasi masyarakat rendah dalam pemberdayaan	Eksternal	UC	tidak meningkatnya kemandirian masyarakat	Dinas PMD/Kecamatan
		Kolusi dalam penunjukkan pelaksanaan kegiatan (LSM/kelompok masyarakat)	RF.26.41.34.31	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
		Penyaluran bantuan tidak tepat sasaran (data penerima dimanipulasi)	RF.26.41.34.32	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Timur



Ketut Sri Narayani S.K.M., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 3.c
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Daerah Kota Denpasar
Nama OPD	: Kecamatan Denpasar Timur
Tahun Penilaian	: 2026
Periode yang dinilai	: RPJMD Tahun 2025 - 2029
Tujuan Strategis	: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Sasaran Strategis OPD	: 1. Meningkatnya Pelayanan Publik 2. Terselenggaranya Urusan Perangkat Daerah di Tingkat Kecamatan 3. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Desa
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota										
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		keterlambatan dalam pembayaran tunjangan pegawai ASN	ROO.26.41.34.01	PA, Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran	sistem eror pada aplikasi	Internal dan Eksternal	C	tidak terbayarnya tunjangan pegawai ASN	ASN yang bersangkutan, bendahara gaji
				penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.03	Camat, Bendahara Pengeluaran	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	ASN yang bersangkutan, bendahara gaji
				salah penyediaan material dan data keuangan palsu	RF.26.41.34.04	Camat	1. lemahnya pengawasan 2. adanya pengaruh/loby/tekanan dari penyedia/atasan	Internal dan Eksternal	C	timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		keterlambatan dalam pengajuan pengamprahan belanja kegiatan	ROO.26.41.34.02	kecamatan denpasar timur	sistem eror pada aplikasi, kelengkapan data dukung pengamprahan belanja kurang, pengajuan belanja tidak sesuai dengan anggaran kas	Internal dan Eksternal	C	nilai kinerja instansi rendah, penyerapan anggaran rendah	kecamatan dan kelurahan
				penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.05	Camat, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (kelurahan)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
				salah penyediaan material dan data keuangan palsu	RF.26.41.34.06	Camat dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	timbulnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		keterlambatan dalam pengajuan pengamprahan belanja kegiatan	ROO.26.41.34.03	kecamatan denpasar timur	sistem eror pada aplikasi, kelengkapan data dukung pengamprahan belanja kurang, pengajuan belanja tidak sesuai dengan anggaran kas	Internal dan Eksternal	C	nilai kinerja instansi rendah, penyerapan anggaran rendah	kecamatan dan kelurahan

			penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.07	Camat, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kelurahan)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
			salah penyediaan material dan data keuangan palsu	RF.26.41.34.08	Camat dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		keterlambatan dalam pengajuan pengamprahan belanja kegiatan	ROO.26.41.34.04	kecamatan denpasar timur	sistem eror pada aplikasi, kelengkapan data dukung pengamprahan belanja kurang, pengajuan belanja tidak sesuai dengan anggaran kas	Internal dan Eksternal	C	nilai kinerja instansi rendah, penyerapan anggaran rendah	kecamatan dan kelurahan
			penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.09	Camat, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kelurahan)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
			salah penyediaan material dan data keuangan palsu	RF.26.41.34.10	Camat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		keterlambatan dalam pengajuan pengamprahan belanja kegiatan	ROO.26.41.34.05	kecamatan denpasar timur	sistem eror pada aplikasi, kelengkapan data dukung pengamprahan belanja kurang, pengajuan belanja tidak sesuai dengan anggaran kas	Internal dan Eksternal	C	nilai kinerja instansi rendah, penyerapan anggaran rendah	kecamatan dan kelurahan
			penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.11	Camat, Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kelurahan)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
			salah penyediaan material dan data keuangan palsu	RF.26.41.34.12	Camat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	kecamatan dan kelurahan
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.41.34.06	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Kesra	pejabat yang menandatangani dokumen tidak ditempat, sistem eror, keterbatasan staff menangani pelayanan	Eksternal dan internal	C	kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	kecamatan dan masyarakat di wilayah kecamatan denpasar utara
			gratifikasi dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan publik	RF.26.41.34.15	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Kesra	Lemahnya pengawasan, lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	C	terjadinya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
			Pemalsuan dokumen pelayanan (izin, rekomendasi, surat keterangan)	RF.26.41.34.16	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Kesra	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diimpahkan kepada Camat	persentase pelaksanaan yang diimpahkan kepada camat		kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.41.34.07	Kasi Pelayanan Umum	pejabat yang menandatangani dokumen tidak ditempat, sistem eror, keterbatasan staff menangani pelayanan	Eksternal dan internal	C	kepuasan masyarakat rendah, kualitas dan efektivitas pelayanan rendah	kecamatan dan masyarakat di wilayah kecamatan denpasar utara
			gratifikasi dalam kegiatan pelaksanaan pelayanan publik	RF.26.41.34.17	Camat, Kasi Pelayanan Umum	Lemahnya pengawasan, lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan, untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan internal	C	terjadinya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan

			Pemalsuan dokumen pelayanan (izin, rekomendasi, surat keterangan)	RF.26.41.34.18	Camat, Kasi Pelayanan Umum	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
	Koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persentase tingkat ketentraman dan ketertiban umum	kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima dan penduduk pendatang	ROO.26.41.34.08	Kasi Trantib	pedagang kaki lima masih banyak yang melanggar peraturan berjualan dan penduduk pendatang belum semuanya tertib administrasi	Eksternal	UC	meningkatnya pengaduan masyarakat terkait pedagang kaki lima dan penduduk pendatang	kecamatan dan masyarakat di wilayah kecamatan Denpasar utara
			gratifikasi dalam kegiatan perencanaan	RF.26.41.34.21	Camat, Kasi Trantib	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan

			Pemalsuan dokumen pelayanan (izin, rekomendasi, surat keterangan)	RF.26.41.34.22	Camat, Kasi Trantib	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai pengusahan Kepala Daerah	persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	kurangnya koordinasi dengan instansi dan lembaga masyarakat terkait	ROO.26.41.34.09	Camat, Kasi Pemerintahan	keterbatasan sumber daya aparatur dalam melaksanakan koordinasi	Internal	C	kurangnya partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam menunjang kegiatan di kecamatan	kecamatan
			gratifikasi dalam kegiatan perencanaan	RF.26.41.34.25	Camat, Kasi Pemerintahan	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
			Kerugian Keuangan Negara	RF.26.41.34.26	Camat, Kasi Pemerintahan	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	usulan dari masyarakat belum terakomodir semuanya	ROO.26.41.34.10	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	kurangnya kemampuan penyusunan dokumen perencanaan	Eksternal	UC	banyak usulan masyarakat yang belum terakomodir pada Musrenbang Kecamatan	kecamatan dan masyarakat di wilayah kecamatan denpasar utara
			gratifikasi dalam kegiatan perencanaan	RF.26.41.34.29	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
			Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.30	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal dan Eksternal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	tidak tercapainya realisasi pemberdayaan masyarakat sesuai anggaran kas yang direncanakan	ROO.26.41.34.11	Lurah, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu (Kelurahan)	proses pengajuan dokumen belanja pemberdayaan masyarakat tidak sesuai anggaran kas	Internal	C	laporan penyerapan anggaran rendah	kecamatan
			gratifikasi dalam kegiatan perencanaan	RF.26.41.34.33	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Eksternal dan Internal	UC	timbulnya praktik gratifikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan
			Penyusunan/Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar	RF.26.41.34.34	Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1. lemahnya pengawasan 2. lemahnya verifikasi bukti untuk pelaporan 3. untuk mendapatkan keuntungan pribadi	Internal	C	berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara	Camat, Kasi/Kasubag, PPTK dan rekanan

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Timur


Kelut Sri Karawana, S.KM., M.Kes
Perfektoria TK.1

NIP. 19710626 199402 2 001

II	Risiko Strategis OPD				
1	program tidak berkelanjutan	RSO.26.41.34.06	4	3	12
2	kualitas pelayanan rendah	RSO.26.41.34.02	2	3	6
3	gangguan ketentraman dan ketertiban umum	RSO.26.41.34.03	3	3	9
4	kebijakan tidak efektif	RSO.26.41.34.04	3	3	9
5	tata kelola desa tidak akuntabel	RSO.26.41.34.05	3	3	9
6	kinerja perangkat daerah tidak optimal	RSO.26.41.34.01	3	1	3
III	Risiko Operasional OPD				
1	tidak tercapainya realisasi pemberdayaan masyarakat sesuai anggaran kas yang direncanakan	ROO.26.41.34.07	4	3	12
2	kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima dan penduduk pendatang	ROO.26.41.34.04	3	3	9
3	kurangnya koordinasi dengan instansi dan lembaga masyarakat terkait	ROO.26.41.34.05	3	3	9
4	usulan dari masyarakat belum terakomodir semuanya	ROO.26.41.34.06	3	3	9
5	kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.41.34.03	2	3	6
6	keterlambatan dalam pembayaran tunjangan pegawai ASN	ROO.26.41.34.01	3	1	3
7	keterlambatan dalam pengajuan pengamprahan belanja kegiatan	ROO.26.41.34.02	3	1	3
IV	Risiko Fraud OPD				
1	operasional trantibum	RF.26.41.34.02	3	3	9
2	evaluasi kebijakan operasional	RF.26.41.34.03	3	3	9
3	pengawasan operasional desa	RF.26.41.34.04	3	3	9

4	keberlanjutan program operasional	RF.26.41.34.05	3	3	9
5	operasional peningkatan pelayanan	RF.26.41.34.01	2	3	6

Denpasar, 31 Desember 2025

Camat Denpasar Timur



Ketur Srijayanti, S.KM., M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 5
Daftar Risiko Prioritas PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Pemda	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
II	Risiko Strategis OPD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
II	Risiko Operasional OPD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Timur


Ketut Sri Karvayana, S.KM., M.Kes
 Pembina Tk. I

NIP. 19710626 199402 2 001

Form 7
 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan PEMDA
 (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko) PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penangggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemda	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
II	Risiko Strategis OPD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
II	Risiko Operasional OPD	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
 Camat Denpasar Timur



Ket. St. Karya. S. K.M., M.Kes
 Pemda Tk. I
 NIP. 19740326 199402 2 001

Form 8
RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DI BANGUN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar					
Tahun Penilaian		: 2026					
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan					
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan					
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Timur


Kentri Sri Kawana, S.KM., M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710626 199402 2 001

Form 9
RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN PEMDA

Nama Pemda		: Pemerintah Daerah Kota Denpasar				
Tahun Penilaian		: 2026				
Tujuan Strategis		: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan				
Urusan Pemerintahan		: Unsur Kewilayahan				
No	Kegiatan Pengendalian Yang dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Denpasar, 31 Desember 2025
Camat Denpasar Timur


Ketut Sri Karjawa S.K.M., M.Kes
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710626 199402 2 001

II	Risiko Strategis OPD									
1	program tidak berkelanjutan	RSO.26.41.34.06								
2	kualitas pelayanan rendah	RSO.26.41.34.02								
3	gangguan ketentraman dan ketertiban umum	RSO.26.41.34.03								
4	kebijakan tidak efektif	RSO.26.41.34.04								
5	tata kelola desa tidak akuntabel	RSO.26.41.34.05								
6	kinerja perangkat	RSO.26.41.34.01								
III	Risiko Operasional OPD									
1	tidak tercapainya realisasi pemberdayaan masyarakat sesuai anggaran kas yang direncanakan	ROO.26.41.34.07								
2	kurangnya pengawasan terhadap pedagang kaki lima dan penduduk pendatang	ROO.26.41.34.04								
3	kurangnya koordinasi dengan instansi dan lembaga masyarakat terkait	ROO.26.41.34.05								
4	usulan dari masyarakat belum terakomodir semuanya	ROO.26.41.34.06								
5	kurang optimalnya pelayanan kepada masyarakat	ROO.26.41.34.03								
6	keterlambatan dalam pembayaran tunjangan pegawai ASN	ROO.26.41.34.01								
7	keterlambatan dalam pengajuan pengamprahan belanja kegiatan	ROO.26.41.34.02								

IV	Risiko Fraud OPD									
1	operasional trantibum	RF.26.41.34.02								
2	evaluasi kebijakan operasional	RF.26.41.34.03								
3	pengawasan operasional desa	RF.26.41.34.04								
4	keberlanjutan program operasional	RF.26.41.34.05								
5	operasional peningkatan pelayanan	RF.26.41.34.01								